

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENYEBAB BELUM BERHASILNYA *DETOX CAMPAIGN* OLEH GREENPEACE DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya, aktor *global civil society* dapat menghadapi tantangan yang berasal dari eksternal yaitu terkait tantangan yang terjadi dalam hubungan antar sektor. Berikut akan dilakukan analisa terhadap faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi Greenpeace dalam melaksanakan Detox Campaign di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2011-2014.

#### **4.1 Permasalahan Pencemaran Air Bukan Merupakan Prioritas Utama di Republik Rakyat Tiongkok**

Salah satu penyebab kurangnya pengaruh dari *Detox Campaign* yang dilakukan oleh Greenpeace adalah kurangnya perhatian terhadap permasalahan lingkungan berupa pencemaran air yang terjadi. Permasalahan lingkungan bukan merupakan permasalahan yang menjadi prioritas utama di Republik Rakyat Tiongkok. Upaya Republik Rakyat Tiongkok dalam menangani permasalahan lingkungan dapat dikatakan masih terbilang kurang. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah investasi yang diberikan kepada penanganan permasalahan lingkungan.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Investasi Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di**  
**Republik Rakyat Tiongkok 2011-2014**

Tahun	GDP per Tahun (100 juta yuan)	Total Investasi Penanganan Pencemaran Lingkungan (100 juta yuan)	Total Investasi Penanganan Pencemaran Industri (10000 yuan)	Total Investasi Penanganan Air Limbah (10000 yuan)
2011	484123.5	7114.0	4434610	1577471
2012	534123.0	8253.5	5004473	1403448
2013	588018.8	9037.2	8496647	1248822
2014	636138.7	9575.5	9976511	1152473

Sumber: *National Bureau of Statistics of China, 2012-2015*

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah investasi penanganan pencemaran lingkungan di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2011 hingga 2014. Berdasarkan data pada tabel 3.1, dapat dilihat bahwa jumlah dana yang diinvestasikan untuk penanganan lingkungan masih terbilang kecil. Berdasarkan ketua dari *Environmental and Natural Resources Law Research Institute*, Wang Canfa, investasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap penanganan pencemaran lingkungan belum sebanding dengan pembangunan dari Republik Rakyat Tiongkok ([www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), 2013). Berdasarkan Wang Canfa, pemerintah seharusnya mengalokasikan 2.5% - 3% dari total GDP ([www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), 2013). Jika dilihat dari total GDP pertahun, jumlah persentase investasi yang dikeluarkan untuk penanganan pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun berada di angka yang tidak mencapai 2% dari total GDP. Persentase

investasi dari total GDP untuk penanganan pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun yaitu hanya sebesar 1.47% pada tahun 2011, 1.55% pada tahun 2012, 1.54% pada tahun 2013, dan 1.51% pada tahun 2014. Jika dilihat dari persentasi investasi untuk penanganan pencemaran lingkungan tersebut, jumlah yang dikeluarkan penanganan pencemaran lingkungan masih terbilang kecil dari total GDP pertahun.

Selanjutnya, pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah investasi yang diberikan untuk penanganan air limbah mengalami penurunan pertahunnya, yakni pada tahun 2011 jumlah investasi masih mencapai angka 15 miliar yuan. Namun, pada tahun 2014 jumlah investasi menurun dan mencapai angka 11 miliar yuan. Selain itu, jumlah investasi terhadap penanganan pencemaran lingkungan di daerah di Republik Rakyat Tiongkok juga masih terbilang kecil. Pada beberapa daerah yang merupakan wilayah dari beberapa industri tekstil yang disebutkan dalam laporan Greenpeace, yaitu Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, dan Fujian, jumlah investasi masih terbilang kecil ([www.data.stats.gov.cn](http://www.data.stats.gov.cn))

Jumlah persentase investasi terhadap penanganan pencemaran lingkungan juga terbilang kecil pada provinsi-provinsi di Republik Rakyat Tiongkok. Provinsi Guangdong yang memiliki jumlah debit air limbah terbesar pada tahun 2013, memiliki total investasi penanganan pencemaran lingkungan sebesar 0.1% dari GDP provinsi tersebut ([www.data.stats.gov.cn](http://www.data.stats.gov.cn)). Tidak berbeda jauh dengan provinsi Guangdong, total investasi terhadap penanganan pencemaran lingkungan di provinsi Shanghai, Jiangsu, Zhejiang dan Fujian hanya berada dalam angka 0.1-0.2% dari GDP per

provinsi pada tahun 2013 ([www.data.stats.gov.cn](http://www.data.stats.gov.cn)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Valadez dan Hu (2016), rendahnya jumlah investasi yang diberikan untuk penanganan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, oleh pemerintah menandakan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian yang terbilang rendah untuk menangani permasalahan lingkungan (Valadez & Hu, 2016).

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pencemaran air mencapai sekitar 240 miliar yuan per tahun ([www.en.people.cn](http://www.en.people.cn), 2015). Tingginya perkiraan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pencemaran air per-tahunnya, telah melampaui jumlah investasi penanganan pencemaran air limbah yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Pada tabel 4.1 telah dipaparkan, jumlah investasi penanganan air limbah hanya mencapai maksimal sekitar 15 miliar yuan pada tahun 2011, dan menurun setiap tahunnya. Sedangkan, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan lebih melampaui jumlah investasi penanganan pencemaran lingkungan, yaitu sekitar 240 miliar per tahun. Hal tersebut kemudian menunjukkan jika jumlah investasi untuk penanganan pencemaran lingkungan, terutama penanganan pencemaran air, masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah kerugian ekonomi yang terjadi.

Selain jumlah investasi yang masih terbilang kecil, implementasi peraturan lingkungan di level lokal masih menjadi tantangan. Pemerintah daerah di Republik Rakyat Tiongkok lebih memiliki fokus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ([www.reuters.com](http://www.reuters.com), 2014). Penanganan pencemaran lingkungan merupakan sebuah tantangan dalam level daerah, hal ini dinyatakan karena pemerintah daerah Republik

Rakyat Tiongkok lebih memiliki fokus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, yakni pembangunan infrastruktur yang lebih memberikan keuntungan bagi negara (Schwartz 2004). Dibandingkan dengan permasalahan lingkungan, pemerintah daerah Republik Rakyat Tiongkok terbilang lebih memiliki fokus pada kompetisi dengan pemerintah daerah lainnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan (Lin & Swanson, 2010).

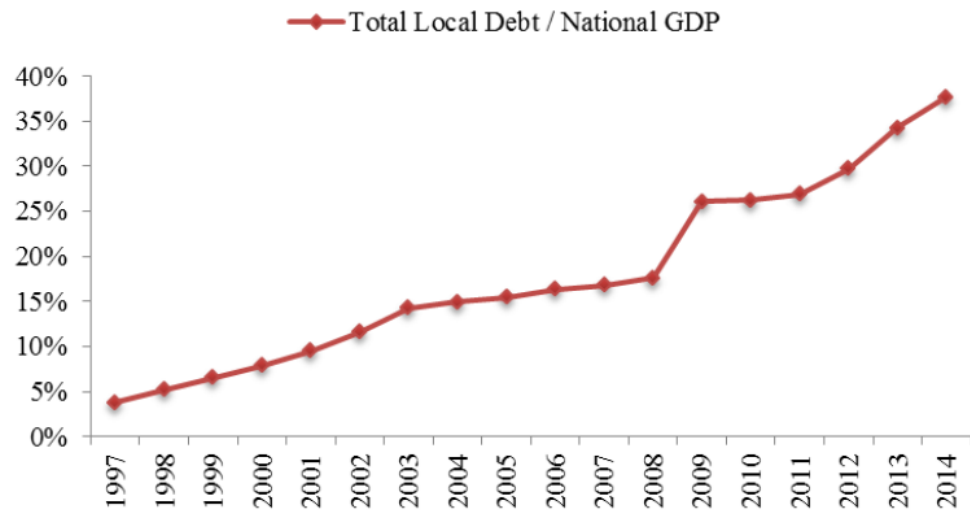
Pemerintah daerah saling bersaing dengan pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan perekonomian, yang termotivasi atas adanya penawaran promosi dan tekanan politik dari pemerintah yang lebih tinggi (Wu, 2015). Adanya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Republik Rakyat Tiongkok kemudian menyebabkan rendahnya perhatian terhadap penanganan pencemaran lingkungan (Schwartz, 2004). Dengan begitu, permasalahan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran lingkungan, kurang menjadi perhatian. Menteri Lingkungan Republik Rakyat Tiongkok, Chen Jining, mengakui bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan dibandingkan dengan perlindungan lingkungan (www.efe.com, 2016). Selain itu, ketidakmampuan *State Environmental Protection System* dalam memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap pemerintah lokal juga kemudian menyebabkan pemerintah lokal memiliki kesadaran yang rendah terhadap penanganan permasalahan lingkungan (Schwartz, 2004).

Salah satu permasalahan daerah yang dialami oleh pemerintah daerah adalah hutang daerah yang semakin menumpuk dari tahun ke tahun. Permasalahan seperti

hutang menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus kepada ekonomi dibandingkan dengan permasalahan lingkungan (Schwartz, 2004).

**Grafik 4.1**

**Total Hutang Pemerintah Daerah per GDP Nasional**



Source: NAO and China National Bureau of Statistics (NBS)

Sumber: Wu, 2015

Grafik 4.1 memaparkan data mengenai total hutang pemerintah daerah Republik Rakyat Tiongkok per total GDP nasional pertahunnya. Pada grafik diatas, termasuk pada tahun 2011-2014, dapat dilihat bahwa hutang pemerintah daerah semakin meningkat pertahunnya. Pada tahun 2011, 2012, dan Juni 2013, diketahui jumlah total hutang pemerintah daerah mencapai 10.72 triliun yuan, 15.89 triliun yuan, dan 17.89 triliun yuan (Wu, 2015). Pada tahun 2014, dapat dilihat bahwa total hutang pemerintah daerah hampir mencapai 40% dari total GDP nasional. Salah satu penyebab

meningkatnya jumlah hutang adalah adanya investasi infrastruktur yang berlebihan, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wu, 2015).

Dari beberapa data diatas, dapat dilihat bahwa permasalahan pencemaran air bukan merupakan prioritas utama dalam Republik Rakyat Tiongkok. Dalam hal ini, Greenpeace masih belum dapat memasuki ruang politik dari Republik Rakyat Tiongkok, dikarenakan permasalahan lingkungan berupa pencemaran air masih belum menjadi prioritas utama dari pemerintah. Hal ini kemudian menyebabkan Greenpeace memiliki kesempatan yang kurang luas dalam mempengaruhi pemerintah.

#### **4.2 Sistem Politik Republik Rakyat Tiongkok**

Salah satu penyebab dari tidak berhasilnya *Detox Campaign* oleh Greenpeace adalah karena sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok. Sistem politik merupakan struktur politik, hukum, peraturan, regulasi yang diimplementasi dan mengatur kekuasaan pemerintah, hubungan antara negara dan masyarakat di Republik Rakyat Tiongkok ([www.china.org.cn](http://www.china.org.cn)). Organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, dalam melaksanakan aktivitasnya kemudian dipengaruhi oleh sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan studi politik, sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok terus dianggap sebagai otoriter (Perinova, 2005).

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang otoriter kemudian menjadi hambatan bagi organisasi non-pemerintah, yakni pemerintah cenderung menggantikan organisasi non-pemerintah yang mandiri dengan organisasi yang kegiatannya dipantau

dan berada di bawah kontrol negara (Perinova, 2005). Melalui regulasi yang berlaku, organisasi non-pemerintah yang melakukan aktivitas di Republik Rakyat Tiongkok harus melakukan sistem manajemen ganda untuk dapat terdaftar secara legal, yakni organisasi non-pemerintah harus melakukan registrasi atau pendaftaran kepada pemerintah dan departemen maupun organ lain yang masih berada di bawah naungan pemerintah, untuk mengawasi pendaftaran dan aktivitas dari organisasi ([www.cecc.gov](http://www.cecc.gov)., 2006). Pendaftaran organisasi non-pemerintah juga merupakan alat administratif utama yang digunakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk membatasi, mengendalikan pertumbuhan, dan aktivitas dari organisasi non-pemerintah (Zhan dan Tang, 2011, Perinova, 2005). Adanya keharusan bagi organisasi non-pemerintah untuk melakukan registrasi tersebut kemudian menunjukkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tetap menginginkan organisasi non-pemerintah untuk berada di bawah naungannya, atau tidak secara sepenuhnya terlepas dari pemerintah dan tidak sepenuhnya independen. Peraturan ini kemudian dapat dilihat sebagai usaha pemerintah untuk mencegah pembentukan organisasi non-pemerintah tumbuh terlalu besar yang dapat menantang negara.

Dalam sistem politiknya, Partai Komunis Tiongkok telah memerintah negara sejak tahun 1949 dan memiliki kekuasaan serta mendominasi negara dan masyarakat di Republik Rakyat Tiongkok (Lawrence dan Martin, 2012). Organisasi non-pemerintah merupakan salah satu sektor yang tidak terlepas dari kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Terkait dengan organisasi non-pemerintah, Partai Komunis Tiongkok



meminta untuk meningkatkan kehadiran partai dalam organisasi, dengan tujuan untuk memperkuat organ partai dengan membentuk cabang partai dalam organisasi ([www.asianews.it](http://www.asianews.it), 2015). Keinginan dari Partai Komunis Tiongkok untuk meningkatkan kehadiran partai dalam organisasi kemudian menandakan bahwa organisasi non-pemerintah masih dalam kontrol dan tidak terlepas dari pengaruh partai tersebut.

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang disebut sebagai negara yang represif dalam menghadapi berbagai protes terkait isu yang terjadi dan merupakan negara yang memiliki kekurangan dalam hal kebebasan penggunaan media ([www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), 2017). Protes terhadap suatu isu termasuk isu hak asasi manusia maupun isu lingkungan hidup seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti penangkapan, ancaman pembubaran organisasi, dan media sosial yang terbatas (Wu, 2009, [www.forbes.com](http://www.forbes.com), 2016, [www.scmp.com](http://www.scmp.com), 2016). Beberapa aktivis lingkungan telah mengalami penangkapan dikarenakan telah melakukan protes dan juga penyebaran informasi mengenai pencemaran (NYTimes, 2007, Hsu, 2016).

Sistem politik yang mengharuskan organisasi non-pemerintah untuk melakukan registrasi untuk dapat terdaftar secara legal dan negara Republik Rakyat Tiongkok yang represif, kemudian mengakibatkan organisasi non-pemerintah terbagi ke dalam dua jenis organisasi. Berdasarkan Frolic (1997), dalam pemerintahan yang otoriter negara mengalami yang dinamakan dengan “masyarakat sipil ganda”, yaitu masyarakat sipil yang dibentuk oleh negara dan dibentuk oleh rakyat (Perinova, 2005).

Berdasarkan dua pembagian organisasi non-pemerintah tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan tindakan yang diambil dalam menangani suatu permasalahan lingkungan yang ada. Organisasi non-pemerintah yang terlihat berani melakukan konfrontasi terhadap pemerintah pada pelaksanaannya tetap berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah (Lu, 2005). Yang dimaksud dengan tetap menjalin hubungan baik adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan kritisi terhadap pemerintah atau memberikan tekanan terhadap pemerintah melalui media akan tetap berupaya dan berharap pemerintah untuk memberikan dukungan, dan juga berusaha untuk dapat tetap tampil baik terhadap pemerintah agar mendapatkan dukungan terhadap organisasi mereka (Lu, 2005). Sementara itu, organisasi non-pemerintah yang tidak berani melakukan konfrontasi terhadap pemerintah dapat dikatakan tidak ingin menarik perhatian terlalu besar dari pemerintah dan lebih memilih untuk menjalin hubungan yang baik dalam melaksanakan kegiatan (Lu, 2005).

Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Republik Rakyat Tiongkok mayoritas lebih fokus kepada kegiatan yang bersifat non-politik, seperti edukasi, proyek konservasi, dan perlindungan spesies (Zhan dan Tang, 2011). Sebagian besar organisasi non-pemerintah tidak ingin untuk terlibat dalam advokasi kebijakan, yang termasuk dalam kegiatan yang bersifat politik, dikarenakan kondisi organisasi dan lingkungan politik yang tidak mendukung serta organisasi yang terlalu fokus pada politik dinyatakan tidak dapat bertahan lama (Zhan dan Tang, 2011). Hal tersebut kemudian dapat dikatakan membatasi jenis kegiatan yang dapat dilakukan

oleh organisasi non-pemerintah, serta mengakibatkan organisasi non-pemerintah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah kemudian juga memanfaatkan organisasi non-pemerintah untuk menjadi alat dari pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan sosial, seperti kesehatan dan edukasi (Morton, 2005). Jika dibandingkan dengan aktivitas pelayanan sosial, organisasi non-pemerintah yang melakukan peran advokasi dan lobi lebih rendah (Perinova, 2005). Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah kemudian memiliki kegiatan yang dibatasi dan harus mengikuti sistem politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok. Oleh karena itu, banyak organisasi non-pemerintah lebih memilih untuk mengikuti pemerintah dan merelakan kebebasan mereka, termasuk untuk menghindari kegiatan yang mungkin dianggap tidak diinginkan oleh pemerintah.

Sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok kemudian juga turut menjadi hambatan bagi Greenpeace dalam melaksanakan aktivitasnya, yakni terbatasnya ruang politik untuk mempengaruhi pemerintah. Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh salah satu direktur kampanye Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok, yaitu Lo Sze-ping, Greenpeace mengalami kesulitan untuk terdaftar secara legal karena sulit mendapatkan pihak pemerintah yang dapat menjadi sponsor dan Greenpeace mendapatkan penolakan dari otoritas perlindungan lingkungan hidup setempat (Edele, 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mann (2013), salah satu anggota Greenpeace menuturkan bahwa membangun hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok merupakan hal yang tidak mudah, yang ditunjukkan dengan adanya

ketidaktertarikan dari pemerintah saat bertemu dengan perwakilan anggota Greenpeace (Mann, 2013). Adanya kesulitan untuk terdaftar secara legal sebagai organisasi non-pemerintah kemudian menyebabkan organisasi non pemerintah, termasuk Greenpeace, untuk melakukan pendaftaran sebagai korporasi agar tetap dapat melakukan aktivitasnya di Republik Rakyat Tiongkok. Pilihan organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, untuk melakukan registrasi sebagai korporasi kemudian mengharuskan mereka untuk membayar pajak yang lebih tinggi (Zhan dan Tang, 2011). Namun, status dari organisasi non-pemerintah yang melakukan registrasi sebagai korporasi membatasi kapasitas mereka untuk membangun kepercayaan publik, penerimaan sosial, penggalangan dana dan perekrutan personil, advokasi kebijakan, dan kampanye (Zhan dan Tang, 2011). Hal ini kemudian menandakan bahwa status yang dimiliki Greenpeace kemudian membatasi aktivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan di Republik Rakyat Tiongkok.

Sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, Greenpeace berusaha untuk mendorong pemerintah untuk terjadinya perubahan kebijakan melalui advokasi yaitu *Detox Campaign*. Namun, dengan kondisi sistem politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok, Greenpeace memiliki ruang politik yang terbatas dalam melaksanakan aktivitas dan dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah. Sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok dapat dikatakan bertentangan dengan salah satu prinsip dari Greenpeace, yakni independen. Namun, dengan kondisi sistem politik yang ada, Greenpeace dalam melaksanakan *Detox*

*Campaign* harus melaksanakan kegiatan dengan cara yang lebih bersahabat (Parameswari, 2016). Dengan sistem politik yang ada, Greenpeace juga harus berhati-hati dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Hal ini dapat dilihat dari demonstrasi publik dari *Detox Campaign* yang lebih mengarah kepada demonstrasi terhadap perusahaan bukan pemerintah. Melalui *Detox Campaign*, Greenpeace menuntut adanya perubahan kebijakan dari pemerintah namun tidak melakukan aksi protes maupun demonstrasi yang ditujukan langsung terhadap pemerintah. Berbeda dengan aktivitasnya Greenpeace di negara lain, yakni cenderung lebih berani dalam melaksanakan aktivitasnya termasuk melakukan aksi protes maupun demonstrasi yang ditujukan langsung terhadap pemerintah. Hal tersebut kemudian juga memberikan dampak terhadap tidak berpengaruhnya *Detox Campaign* terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yakni dikaitkan dengan terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan oleh Greenpeace.

### **4.3 Kesimpulan**

Dari pemaparan pada bab ini, dapat dikatakan bahwa penyebab *Detox Campaign* tidak berhasil dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah dikarenakan ruang politik yang terbatas. Dalam hal ini, terkait dengan isu pencemaran air yang bukan merupakan prioritas utama dan sistem politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok. Terbatasnya ruang politik yang ada kemudian menyebabkan Greenpeace memiliki peluang kecil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.